

Mendekonstruksi bias dalam kurikulum: Menuju pendidikan yang inklusif dan beragam

Zahwah Fazat Minnataka

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: zahwaminnataka865@gmail.com

Kata Kunci:

Dekonstruksi kurikulum;
pendidikan inklusif; wilayah
3t; manajemen adaptif;
kesetaraan.

Keywords:

Curriculum deconstruction;
inclusive education; 3t
regions; adaptive
management; equality.

ABSTRAK

Kurikulum nasional sering kali membawa bias tersembunyi yang mengabaikan keragaman sosiogeografis, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Artikel ini bertujuan mengeksplorasi pentingnya dekonstruksi bias kurikulum menuju sistem pendidikan yang inklusif. Menggunakan metode studi pustaka, kajian ini menemukan bahwa inti dekonstruksi adalah membongkar pola pikir penyeragaman kaku yang memaksakan standar kota besar pada daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Temuan menunjukkan bahwa ketidaksiapan manajemen dan kurangnya kejujuran birokrasi dalam transisi kurikulum telah memicu apatis akademik di kalangan pelajar.

Sebagai solusi, ditawarkan konsep manajemen kurikulum adaptif yang memberikan otonomi bagi daerah untuk memodifikasi metode pembelajaran berbasis potensi lokal tanpa meninggalkan inti capaian nasional. Rekonstruksi ini krusial untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kesetaraan hak bagi seluruh anak bangsa dalam sistem pendidikan Indonesia.

ABSTRACT

The national curriculum often carries hidden biases that ignore sociogeographic diversity, particularly in the 3T (Frontier, Outermost, and Disadvantaged) regions. This article aims to explore the importance of deconstructing curriculum bias towards an inclusive education system. Using a literature review method, this study finds that the core of deconstruction is dismantling the rigid, uniform mindset that imposes big city standards on areas with limited infrastructure. The findings indicate that management unpreparedness and a lack of bureaucratic honesty in curriculum transition have fueled academic apathy among students. As a solution, the concept of adaptive curriculum management is proposed, which grants autonomy to regions to modify learning methods based on local potential without abandoning the core of national achievements. This reconstruction is crucial for fostering a sense of ownership and equal rights for all children in the Indonesian education system.

Pendahuluan

Pendidikan idealnya menjadi instrumen pembebasan dan penyetaraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun, dalam realitasnya, kurikulum sering kali dianggap sebagai dokumen teknis yang netral, padahal di dalamnya terdapat bias yang melanggengkan ketimpangan. Hal ini selaras dengan konsep *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi, di mana nilai-nilai dan norma yang tidak tertulis justru lebih kuat memengaruhi persepsi siswa dibandingkan materi formal (Nugraha et al., 2025).



Ketimpangan ini sering kali dianggap sebagai kewajaran oleh masyarakat karena telah terstruktur sedemikian rupa dalam sistem pendidikan nasional (Mustofa, 2016).

Salah satu bentuk bias yang nyata adalah dominasi perspektif mayoritas, baik dalam aspek keagamaan maupun geografis. Meskipun Indonesia mengakui keberagaman agama, banyak instansi pendidikan yang secara implisit lebih condong pada satu agama tertentu, sehingga mengabaikan identitas penganut agama lain yang juga diakui negara. Selain itu, kurikulum saat ini cenderung “Jakarta-sentris” atau hanya mengunggulkan wilayah-wilayah maju, sementara wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sering kali terabaikan. Kondisi ini menciptakan perasaan terasing bagi pelajar di daerah terpencil, yang pada akhirnya menurunkan motivasi belajar karena materi yang disajikan tidak relevan dengan realitas kehidupan mereka (Fazira et al., 2003).

Permasalahan ini tidak lepas dari peran manajemen dan kepemimpinan pendidikan di tingkat pusat. Kurikulum merdeka yang digadang-gadang berpusat pada murid sering kali sulit direalisasikan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam memetakan realitas secara rata di seluruh daerah menyebabkan adanya “korban” dalam setiap pergantian kurikulum, terutama bagi siswa yang harus mengalami masa transisi atau *switch* tanpa kesiapan sistem. Oleh karena itu, diperlukan peran manajemen sekolah yang strategis untuk menjembantani kesenjangan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal yang inklusif (Hamzah et al., 2024)

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya untuk menciptakan pendidikan yang inklusif tidak cukup hanya dengan menambah materi baru, melainkan harus melalui proses dekonstruksi terhadap cara berpikir lama. Mendekonstruksi bias berarti membongkar cara pandang yang selama ini menganggap normal marginalisasi terhadap kaum minoritas maupun kelompok yang dianggap “kecil”. Oleh karena itu, artikel ini disusun menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kritis untuk mengeksplorasi bagaimana dekonstruksi kurikulum dapat dilakukan guna menciptakan ruang belajar yang benar-benar bersih, relevan, dan menumbuhkan rasa kepemilikan bagi seluruh peserta didik, terlepas dari latar belakang identitas maupun kondisi geografis mereka.

Pembahasan

Analisis Ketimpangan dan Bias dalam Realitas Kurikulum Nasional

Ketimpangan dalam sistem pendidikan sering kali muncul melalui mekanisme yang halus dan tidak disadari, yang dalam literatur akademik dikenal sebagai *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum ini mencakup nilai-nilai, norma, dan perlakuan yang tidak tertulis namun secara efektif membentuk persepsi siswa terhadap diri mereka dan orang lain (Umagap et al., 2022). Salah satu bentuk bias yang paling nyata adalah dominasi identitas mayoritas dalam rutinitas keagamaan di sekolah. Seperti halnya dalam doa bersama yang hanya terpusat pada satu agama dan penyediaan tempat ibadah yang hanya difokuskan pada agama mayoritas dengan alasan jumlah pengikut minoritas yang sedikit, telah menciptakan ruang pemisah bagi siswa lainnya. Hal ini ironis karena di dalam kelas siswa diajarkan nilai toleransi secara teoretis,

namun praktik di lapangan justru menunjukkan perbedaan perlakuan yang membuat siswa minoritas merasa terpojok dan rendah diri. Implementasi *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi yang tidak inklusif ini justru berisiko menanamkan bibit eksklusivitas pada diri siswa sejak dini (Nugraha et al., 2025).

Selain aspek keagamaan, bias kurikulum juga bermanifestasi dalam bentuk kesenjangan geografis yang tajam antara wilayah maju dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Saat ini, kurikulum cenderung menggunakan standarkelulusan dan materi ajar yang disama-ratakan tanpa mempertimbangkan relevansi kontekstual bagi pelajar di daerah terpencil. Ketidakadilan ini muncul ketika pemerintah hanya sekadar memastikan kurikulum telah tersampaikan tanpa memastikan bahwa siswa benar-benar memahami konteksnya atau belum. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, pelajar di wilayah 3T akan mengalami krisis motivasi dan merasa terbelakang karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin canggih (Setyawan et al., 2025). Dalam jangka panjang, ketidaksetaraan kualitas sumber daya manusia ini dapat merugikan bangsa, bahkan membuka celah bagi dominasi pihak asing yang akan lebih mudah membodohi generasi yang tertinggal secara teknologi dan literasi akibat kurikulum yang tidak relevan (Khoerotunnisa et al., 2025).

Bentuk bias lain yang sering kali luput dari perhatian karena dianggap sebagai lelucon adalah diskriminasi berbasis latar belakang sosial dan budaya di dalam kelas (Rofiq, 2014). Pengajar terkadang secara tidak sengaja menunjukkan keberpihakan pada kelompok tertentu melalui pemilihan topik pembahasan yang hanya familiar bagi kelompok tersebut atau melalui reaksi negatif terhadap perbedaan logat bicara siswa. Perlakuan yang mengecilkan suatu kaum ini, meski terlihat sepele akan tetapi hal tersebut merupakan awal dari kehancuran karakter siswa karena dapat meruntuhkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa percaya mereka terhadap sistem pendidikan (Fazira et al., 2003). Pengasingan identitas ini menjadi faktor krusial yang menurunkan motivasi belajar, yang jika tidak segera didekonstruksi melalui manajemen kurikulum yang peka dan inklusif, akan menyebabkan hilangnya potensi besar dari anak-anak bangsa yang seharusnya menjadi pilar kemajuan (Hamzah et al., 2024).

Manajemen Kepemimpinan Pendidikan dalam Transisi Kurikulum

Efektivitas sebuah kurikulum sangat bergantung pada kejujuran dan kompetensi birokrasi di bawah kepemimpinan pemerintah pusat. Manajemen pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pengawas atau supervisor di setiap daerah bekerja secara jujur dalam memotret kenyataan di lapangan. Pemerintah harus menjamin bahwa orang-orang yang diberikan kepercayaan adalah figur yang kredibel, sehingga setiap ketidaksiapan daerah dalam menjalankan kurikulum bisa segera ditangani dan tidak dibiarkan menumpuk menjadi masalah yang lebih besar (Solichin, 2015). Jika birokrasi tidak jujur, kebijakan kurikulum akan selalu gagal karena diputuskan tanpa tahu kenyataan sesungguhnya di daerah terpencil.

Ketidaksiapan manajemen dalam mengelola pergantian kurikulum yang terlalu cepat telah menciptakan fenomena “korban transisi”. Perubahan sistem yang mendadak seringkali memicu kebingungan kolektif seperti guru menjadi bingung dengan metode baru dan siswa akhirnya kehilangan arah dalam belajar (Simanjuntak et

al., 2025). Dampak yang paling nyata adalah munculnya sikap apatis pada pelajar, di mana mereka menjadi tidak peduli lagi dengan sekolah karena merasa sistemnya terus berubah-ubah dan tidak stabil. Kerugian ini sangat fatal karena banyak waktu produktif siswa yang terbuang sia-sia hanya untuk beradaptasi dengan sistem baru yang belum tentu cocok dengan kondisi mereka.

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang memberikan kebebasan bagi daerah 3T untuk memodifikasi cara belajar mereka. Pemerintah tidak boleh menyamaratakan aturan antara kota besar dan daerah pelosok. Kurikulum yang ideal harus memiliki sifat fleksibel, di mana wilayah yang maju bisa berakselerasi dengan teknologi, sementara daerah 3T tetap diberikan ruang untuk menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kemampuan mereka asalkan inti pelajarannya tetap tercapai (Handayani et al., 2024). Pemimpin pendidikan harus lebih mengutamakan pengayoman terhadap masa depan siswa daripada sekadar mengejar jabatan atau formalitas laporan kerja.

Rekonstruksi Kurikulum: Strategi Dekonstruksi Cara Berpikir

Rekonstruksi kurikulum yang inklusif harus dimulai dengan mendekonstruksi pola pikir penyeragaman (*uniformity*) yang masih mendominasi kebijakan pendidikan nasional. Pola pikir yang mengharuskan seluruh peserta didik memiliki kemahiran digital di saat infrastruktur dasar seperti listrik belum stabil di wilayah 3T adalah bentuk pengabdian terhadap realitas sosiogeografis (Andini & Bashith, 2025). Pemerintah tidak seharusnya memaksakan standar digitalisasi tanpa adanya fasilitas sarana yang merata. Bahkan, masalah ini diperparah oleh adanya oknum yang menyalahgunakan anggaran fasilitas pendidikan, yang secara langsung berdampak pada kerugian hak belajar siswa di daerah (Lisabe, 2025). Selain bias teknologi, pola pikir seragam lainnya yang perlu dibongkar adalah standar evaluasi yang hanya berbasis pada hasil tes kognitif tertulis tanpa mempertimbangkan pencapaian kompetensi dalam konteks lingkungan lokal siswa. Penyeragaman ini justru menciptakan ketidakadilan pendidikan karena gagal mengakomodasi keragaman potensi yang ada.

Sebagai solusi nyata, diperlukan implementasi manajemen kurikulum adaptif yang memberikan kebebasan bagi daerah 3T untuk memodifikasi metode pembelajaran dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) setempat. Modifikasi ini tetap berpegang teguh pada inti kurikulum nasional, namun diimplementasikan melalui pendekatan yang berbeda secara teknis. Jika di wilayah perkotaan siswa menggunakan laboratorium digital, maka di daerah 3T siswa dapat diarahkan untuk melakukan observasi secara langsung di alam sebagai laboratorium hidup. Metode rombakan yang ideal adalah dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam materi ajar, misalnya melalui proyek lapangan menjadi lebih hidup dan fungsional (Handayani et al., 2024). Hal ini menuntut kepemimpinan kepala sekolah yang partisipatif dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk berani berinovasi tanpa rasa takut akan teguran birokrasi, sejauh modifikasi tersebut tidak menyimpang dari koridor hukum dan Undang-Undang (Sapriadi et al., 2025).

Strategi dekonstruksi ini pada akhirnya bertujuan untuk membangun rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan kepercayaan diri di kalangan pelajar di wilayah pelosok. Dengan desain kurikulum yang tidak menonjolkan perbedaan fasilitas sebagai

hambatan, siswa di daerah 3T dapat merasa setara dengan siswa di pusat kota karena mereka juga memiliki keunggulan kompetitif melalui penguasaan lingkungan nyatanya. Perbedaan metode belajar antara “praktek di lab” dan “praktek di alam” tidak boleh dilihat sebagai pemisah kualitas, melainkan sebagai variasi jalan menuju inti pendidikan yang sama. Melalui fleksibilitas yang terarah ini, pendidikan nasional dapat bertransformasi menjadi ruang yang inklusif, di mana setiap anak bangsa merasa dihargai identitasnya dan diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan realitas kehidupannya masing-masing.

Kesimpulan dan Saran

Dekonstruksi bias dalam kurikulum merupakan langkah krusial untuk mengubah pola pikir penyeragaman yang kaku (*one size fits all*) yang memaksa daerah 3T mengikuti standar kota besar tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Dekonstruksi disini bermaksud mengalihkan fokus dari formalitas birokrasi menuju manajemen adaptif yang memberikan otonomi bagi daerah untuk memodifikasi metode belajar sesuai realitas sosiogeografisnya. Dengan memberikan kebebasan modifikasi tersebut, kurikulum tidak lagi menjadi beban administratif yang memicu apatisme siswa, melainkan menjadi ruang yang menumbuhkan rasa kepemilikan dan kesetaraan hal bagi seluruh anak bangsa tanpa mengabaikan standar capaian nasional.

Pemerintah perlu menyediakan payung hukum yang menjamin keleluasaan modifikasi kurikulum di wilayah pelosok serta memperketat pengawasan birokrasi guna mencegah penyalahgunaan fasilitas pendidikan. Kepala sekolah hendaknya mengoptimalkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan memanfaatkan potensi alam setempat sebagai laboratorium belajar utama untuk mengatasi ketimpangan teknologi. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan mampu merumuskan standar evaluasi yang tetap adil bagi siswa yang menempuh jalur modifikasi kurikulum tersebut agar kualitas dan hasil belajar mereka tetap diakui secara setara di tingkat nasional.

Daftar Pustaka

- Andini, L. F., & Bashith, A. (2025). Perubahan kurikulum dan dampak pergantian kurikulum13 (K13) ke kurikulum merdeka. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 388–395. <https://repository.uin-malang.ac.id/24589/>
- Fazira, W., Batubara, W. A., & Siregar, A. S. (2003). No Title. *Integrasi Pendidikan Multikultural Dalam Sistem Pendidikan Nasional: Strategi Membangun Masyarakat Inklusif Dan Toleran*.
- Hamzah, E., Gaffar, A., & Kurniawan, T. (2024). *Peran manajemen sekolah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif* 1. 1, 26–35.
- Handayani, L., Samosir, E. N., Sutono, Riana, D., Turan, S. I., & Dwiyono, Y. (2024). No Title. *Peran Kepemimpinan Pendidikan Dalam Mengintegrasikan Teknologi Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah Dasar Negeri 1Lisa*.
- Khoerotunnisa, N., Qolbi, T., Kurniawan, A. A., Salsabila, A., Ilmu, F., & Muhammadiyah, U. (2025). *Pemerataan yang Tidak Merata: Infrastruktur dan Kesenjangan Sosial Pemicu Krisis Nasionalisme*. 01(03), 552–560.

- Lisabe, C. (2025). No Title. *Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah*.
- Mustofa, S. (2016). *Kualitas pendidikan nasional & full day school program*. <https://repository.uin-malang.ac.id/9015/>
- Nugraha, M. G., Hady, M. S., Basith, A., Negeri, I., Malik, M., & Malang, I. (2025). *Implementasi The Hidden Curriculum dalam Pembentukan Akhlak Siswa di MA Muallimat Kota Malang*. 8, 7108–7115.
- Rofiq, A. (2014). *Tidak ada diskriminasi dalam ibadah*. <https://repository.uin-malang.ac.id/6348/>
- Sapriadi, N. R., Unir, U. U., Mardhiah, & Baharuddin. (2025). No Title. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Di Smpn 3 Bissappu*.
- Setyawan, A., Khotimah, D. K., & Febri, W. A. (2025). *Dampak Kesenjangan Digital Terhadap Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah 3T (Terdepan , Terluar , Tertinggal) Indonesia*. 03(04), 1378–1386.
- Simanjuntak, A., Pasaribu, S. A., Hutabarat, S. L., & Lasrotua, S. (2025). *Dampak Perubahan Kurikulum Berkelanjutan terhadap Pembelajaran di Sekolah Dasar The Impact of Continuous Curriculum Change on Learning in Elementary Schools*. 10521–10529.
- Solichin, M. (2015). No Title. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi Mujiyanto*.
- Umagap, S., Salamor, L., & Gaito, T. (2022). *Hidden Curriculum (Kurikulum Tersembunyi) Sebagai Wujud Pendidikan Karakter (Studi pada SMK Al-Wathan Ambon)*. 6(2), 5329–5334.